

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Ketersediaan fasilitas pelayanan di Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2018 terdiri dari 6 TK, 67 SD, 29 SMP, 6 SMA, 4 SMK, 1 Rumah Sakit Umum, 8 Puskesmas, 25 Pustu, 1 Poliklinik, 2 Apotek, 8 Pasar, 77 Koperasi, 2 Hotel, 490 Restoran/Rumah Makan, 2 Bank, 97 Masjid, 124 Gereja Protestan dan 14 Gereja Katholik dengan total keseluruhan yakni 963 unit fasilitas pelayanan. Sedangkan pada tahun 2024, ketersediaan fasilitas pelayanan di Kabupaten Pakpak Bharat meningkat menjadi 1.035 unit yang terdiri dari 7 TK, 69 SD, 31 SMP, 7 SMA, 4 SMK, 1 Rumah Sakit Umum, 8 Puskesmas, 24 Pustu, 1 Poliklinik, 2 Apotek, 7 Pasar, 86 Koperasi, 3 Hotel, 534 Restoran/Rumah Makan, 3 Bank, 103 Masjid, 128 Gereja Protestan, dan 15 Gereja Katholik. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas pelayanan di Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2018 – 2024 menunjukkan adanya perkembangan meskipun masih belum tergolong merata.
2. Tingkat perkembangan wilayah pada Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2018 – 2024 menunjukkan perkembangan yang tidak merata antar kecamatan. Berdasarkan analisis indeks sentralitas, Kecamatan Salak

tetap bertahan menempati orde/hierarki 1 dengan peningkatan fasilitas dari 226 dengan nilai indeks sentralitas 584,84 pada tahun 2018 menjadi 248 unit fasilitas dengan nilai indeks 862,99 pada tahun 2024. Pada Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe yang tetap konsisten pada hierarki 3 dengan nilai indeks sentralitas, sedangkan Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu menurun dari menempati orde/hierarki 3 pada tahun 2018 menurun menjadi orde/hierarki 4 pada tahun 2024. Sementara itu, pada kecamatan lainnya seperti Kecamatan Pergetteng – Getteng Sengkut, Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Tinada, dan Kecamatan Siempat Rube konsisten pada hierarki 4 meskipun tiap kecamatan mengalami kenaikan jumlah fasilitas. Selanjutnya, berdasarkan analisis skoring menunjukkan bahwa tingkat perkembangan tertinggi di Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2018-2024 terdapat pada Kecamatan Salak dengan nilai indeks komposit 13, Kecamatan Tinada dengan nilai indeks komposit sebesar 13, dan Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe dengan nilai indeks komposit sebesar 11. Selanjutnya untuk kategori sedang terdapat pada Kecamatan Pergetteng – Getteng Sengkut dengan nilai indeks komposit sebesar 9 dan Kecamatan Siempat Rube dengan nilai indeks komposit sebesar 9. Sedangkan untuk kategori rendah terdapat pada Kecamatan Pagindar dengan nilai indeks komposit 6, Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu dengan nilai indeks komposit 6, dan Kecamatan Kerajaan dengan nilai indeks komposit 8.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis tingkat perkembangan wilayah berdasarkan hierarki pusat pelayanan di Kabupaten Pakpak Bharat, maka saran yang dapat peneliti berikan antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan Pusat Pelayanan di kecamatan hierarki rendah dengan cara Pemerintah daerah perlu mengembangkan pusat-pusat pelayanan baru, khususnya di kecamatan yang masih berada pada hierarki pelayanan tingkat 4, seperti Kecamatan Pagindar, Kecamatan Tinada, Kecamatan Siempat Rube, dan Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu. Pengembangan dapat dilakukan melalui penambahan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta peningkatan kualitas infrastruktur agar mampu menaikkan peran kecamatan tersebut dalam sistem pelayanan wilayah.
2. Peningkatan aksesibilitas wilayah tertinggal dengan cara meningkatkan jaringan jalan, transportasi, dan konektivitas antarkecamatan, agar wilayah perifer lebih terhubung dan tidak semakin tertinggal dari pusat pertumbuhan.
3. Perencanaan Pembangunan Wilayah Secara Inklusif dan Berbasis Data dengan cara Pemerintah perlu merancang kebijakan pembangunan yang berbasis data spasial dan sosial ekonomi, serta menerapkan prinsip pembangunan yang inklusif, agar tidak terjadi kesenjangan antarkecamatan. Hasil analisis indeks sentralitas dan klasifikasi perkembangan wilayah ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan prioritas pembangunan dan pengalokasian anggaran daerah.

4. Monitoring dan Evaluasi Berkala dengan cara Pemerintah daerah disarankan untuk melakukan pemantauan rutin terhadap distribusi fasilitas pelayanan dan kemajuan pembangunan wilayah agar setiap perubahan dapat direspons secara adaptif. Monitoring ini juga penting untuk mengevaluasi apakah kebijakan yang telah diterapkan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh kecamatan.



THE
Character Building
UNIVERSITY